

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah menyadari bahwa kunci untuk mencapai kemakmuran rakyat dan keberhasilan dalam pembangunan adalah menurunkan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Aspek terpenting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pemerintah dalam memusatkan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka (BPS, 2015).

Di Indonesia pada tahun 2016, penduduk yang hidup dalam kemiskinan mencapai sebesar 27.76 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 3.8 persen pada tahun berikutnya yang setara dengan 1 juta jiwa penduduk. Walaupun persentase kemiskinan mengalami penurunan dari 10.70 persen ke 10.64 persen, namun jumlah angka kemiskinan mengalami kenaikan dalam konteks jumlah penduduk yaitu sebesar 27.77 juta jiwa (BPS, 2017).

Pembangunan ekonomi daerah dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingginya jumlah pendapatan akan mempengaruhi kemajuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, pada akhirnya kemiskinan dapat diatasi secara perlahan-lahan (Tambunan, 2012). Meningkatnya pendapatan per kapita memberikan gambaran laju pertumbuhan dan menggambarkan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi (Arsyad, 1999). Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut (Tambunan, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan masyarakat, yang berdampak pada penurunan pola konsumsi masyarakat dan peningkatan kemiskinan, sehingga perekonomian menjadi tidak seimbang (Tambunan, 2012). Perekonomian akan berada dalam keadaan seimbang apabila sisi pendapatan sama dengan sisi pengeluaran, keadaan ini dapat tercipta jika semua pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga dibelanjakan dengan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (Mangkoesobroto dan Algifari, 1998).

Negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dapat di klasifikasikan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas masyarakat yang akan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun (Todaro, 2000). Indeks pembangunan manusia memfokuskan pada tujuan akhir pembangunan (usia panjang, pengetahuan dan pilihan material) dan tidak sekadar alat pembangunan (hanya GNP per kapita), selain itu juga bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia antar negara maupun antar daerah (Kuncoro, 2015).

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Kondisi menganggur mengakibatkan seseorang tidak dapat memiliki pendapatan, sehingga kesejahteraan yang telah dicapai akan makin merosot. Semakin turnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan (Nursetyo *et al*, 2013). Oleh karena itu, apabila penduduk tanpa disertai dengan peningkatan kualitas dan lapangan pekerjaan akan berkontribusi dalam meningkatkan jumlah orang miskin dan penurunan kualitas sumber daya manusia (Todaro, 2000). Hal tersebut menjadikan pemerintah membutuhkan biaya besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar mereka tidak berada dalam lubang kemiskinan.

Sumatera Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam yang dapat meningkatkan pendapatan daerah atau produk domestik regional bruto (PDRB) untuk mensejahterakan masyarakat, namun Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi masalah kemiskinan. Kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan yaitu mencapai 1,101.20 juta jiwa, namun mengalami penurunan sebesar 0.41 persen (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1
Penduduk Miskin Sumatera Selatan Periode 2011-2016

Tahun	Penduduk Miskin (Juta Jiwa per Orang)	Persentase
2011	1,061.87	13.95
2012	1,043.62	13.48
2013	1,104.57	14.06
2014	1,085.80	13.62
2015	1,145.63	14.25
2016	1,101.20	13.54

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan banyak tersebar di daerah permukiman desa daripada permukiman kota (lihat tabel 1.2). Tabel 1.2 menjelaskan bahwa perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan selama 6 tahun sejak tahun 2011, namun kenaikan yang dimiliki oleh permukiman kota terjadi setelah tahun 2015. Kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2011-2012 sebesar 20,493 persen dan juga pada tahun 2013 ke 2014. Akan tetapi, dua tahun berikutnya pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan hampir 24 persen dengan jumlah sebanyak 414,619 juta jiwa. Minimnya sarana

dan prasarana di pedesaan, perbedaan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan terbatas menjadi penyebab angka kemiskinan pedesaan menjadi naik.

Tabel 1.2
Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan Periode 2010-2016

	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Perkotaan	2011	409.145
	2012	388.652
	2013	384.773
	2014	367.121
	2015	390.870
	2016	414.619
	Pedesaan	2011
2012		668.379
2013		725.600
2014		733.708
2015		754.758
2016		775.808

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

Provinsi Sumatera Selatan secara administratif atau pembagian wilayah terdiri dari kabupaten/kota. Sama halnya dengan di Provinsi Indonesia lainnya bahwa, kabupaten/kota Sumatera Selatan juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang terus tumbuh setiap tahunnya, perkembangannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini (tabel 1.3)

Tabel 1.3
Pertumbuhan Kemiskinan Periode 2011-2016

Kabupaten /Kota	Tahun (perentase)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
OKU	11.58	11.19	12.31	11.96	13.22	13.29
OKI	15.06	14.53	15.82	15.30	17.08	16.03
Muara Enim	13.71	13.21	14.26	13.76	14.54	13.56
Lahat	17.92	17.45	18.61	18.02	18.02	17.11
Musi Rawas	18.25	17.67	17.85	17.28	15.13	14.30
Musi Banyuasin	18.99	18.29	18.02	17.38	18.35	17.27
Banyuasin	11.66	11.27	12.28	11.88	12.45	11.72
OKU Selatan	10.84	10.49	11.57	11.21	11.58	10.95
OKU Timur	9.23	8.98	10.28	10.13	11.24	11.29
Ogan Ilir	13.18	12.79	13.86	13.38	14.43	13.80
Pali	17.36	16.74	16.12	15.50	14.88	14.26
Musi Raws Utara	18.65	18.92	19.19	19.46	19.73	20.00
Empat Lawang	13.82	13.36	13.10	12.89	13.33	13.80
Palembang	14.13	13.59	13.36	12.93	12.85	12.04
Prabumulih	12.19	11.71	11.23	10.86	12.12	11.44
Pagar Alam	9.24	9.00	9.00	8.90	9.64	9.19
Lubuk Linggau	14.43	13.88	14.37	13.90	15.16	13.99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

Tabel data statistik 1.3 menjelaskan laju pertumbuhan kemiskinan kota/kabupaten Sumatera Selatan selama periode 2011–2016. Dari perbandingan kabupaten/kota tersebut, selama tahun 2011 angka kemiskinan tertinggi berada di kabupaten/kota Musi Banyuasin angka tersebut mencapai 18.99 persen. Akan tetapi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 jumlah kemiskinan tertinggi berada di kabupaten/kota Musi Rawas Utara bahkan mencapai 20.00 persen pada tahun 2016.

Angka kemiskinan terendah pada tahun 2011 sampai tahun 2012 terdapat di kabupaten/kota Oku Timur sebesar 9.23 persen menurun pada tahun 2012 dengan tingkat sebesar 0.25 persen angka yang mencapai 8.98 persen. Namun,

selama periode tahun 2013 sampai periode 2016 bukan berada di kabupaten/kota Oku Timur melainkan terdapat di kabupaten/kota Pagar Alam angka kemiskinan pada tahun 2013-2016 sebesar kurang lebih 9.00 sampai 9.19 persen.

Penanganan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk masyarakat miskin belum sepenuhnya berhasil. Walaupun pemerintah sudah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat perda no tujuh tahun 2011 atau peraturan seperti UU no tiga belas tahun 2011, namun manfaat yang didapatkan belum dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diperbaiki dan dievaluasi guna mendapatkan hasil maksimal dalam pengentaskan kemiskinan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Dalam Kabupaten/kota di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016"**.

B. Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Dengan periode penelitian hanya tahun 2010-2016.
3. Lokasi penelitian untuk 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Selatan?
2. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Selatan?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Selatan?
4. Seberapa besar pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Selatan?

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, kesempatan dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan kepada akademisi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang diukur dari pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengangguran. Serta Tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi yang membacanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan ekonomi mengenai kemiskinan dalam kota/kabupaten Provinsi wilayah Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk menentukan tindakan dan kebijakan yang tepat khususnya dalam

menurunkan angka kemiskinan sehubungan dengan efek PDRB,
Indeks pembangunan manusia, dan pengangguran.